

## LAPORAN SINGKAT

**KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)**

=====  
Tahun Sidang : 2006 - 2007  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI  
Rapat ke : 4  
Sifat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 28 Mei 2007  
Pukul : 09.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga  
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1  
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat  
2. Penjelasan oleh Menhan dan Panglima TNI  
3. Tanya Jawab  
4. Penutup  
Hadir Anggota : 48 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : - Menteri Pertahanan RI, Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA  
- Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP beserta jajarannya

### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **II KESIMPULAN**

#### **A. MENTERI PERTAHANAN**

1. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa isi perjanjian Defence Cooperation Agreement antara Indonesia - Singapura mengandung kelemahan yang lebih menguntungkan pihak Singapura dan lebih merugikan pihak Indonesia. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI minta pemerintah untuk memperbaiki substansi perjanjian kerjasama tersebut dengan memasukkan secara rinci dalam Implementing Arrangement (IA) hal-hal yang menjadi sorotan/concern masyarakat, seperti antara lain perincian, pembatasan penggunaan wilayah latihan, batasan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, akses luas TNI terhadap fasilitas alutsista, dan wilayah latihan dan kerjasama militer di Singapura, jangka waktu perjanjian, dan selektifitas pelibatan pihak ketiga dalam latihan militer yang diadakan.

2. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa DCA dan Extradition Treaty (ET) merupakan dua perjanjian yang tidak terkait secara substansial. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI meragukan preposisi Menteri Pertahanan yang meyakini bahwa DCA dapat dijadikan faktor penekan dalam melaksanakan Extradition Treaty.
3. Komisi I DPR RI mendesak Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di lingkungan Departemen Pertahanan yang hingga sekarang belum berhasil dituntaskan, seperti penyelesaian pengadaan Helikopter Mi-17, Mi-2, pengadaan sejumlah rudal, penyelesaian proses hukum kasus Almarhum Koesmayadi, dan pengalihan/penghapusan bisnis TNI.
4. Komisi I DPR RI minta Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta seluruh jajarannya agar memperhatikan dan melaksanakan seluruh kesimpulan dan keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

#### **B. PANGLIMA TNI**

1. Komisi I DPR RI menegaskan pemerintah perlu terus meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh aparat pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjaga agar dinamika perkembangan politik dan pembangunan NAD harus tetap dalam kerangka Propinsi NAD sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia dan implementasi Otonomi Khusus di NAD. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI sependapat dengan Panglima TNI, bahwa munculnya gejala bangkitnya eks GAM dengan manuver-manuvernya yang tidak sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menjadi *concern* semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, partai politik, dan TNI.
2. Komisi I DPR RI mendesak Panglima TNI agar menuntaskan penyelesaian tanah dan Rumah Dinas yang bermasalah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pendekatan dialog dengan para penghuni/purnawirawan, serta khususnya menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang ditempati warga di Tanjung Perak/Ujung Surabaya sebagaimana kesepakatan yang dicapai TNI-AL dengan rakyat penggarap, dengan mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian ganti rugi tanah tersebut.

#### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

KETUA RAPAT,

**THEO L. SAMBUAGA**

## **Interupsi**

### **1. Permadi**

Terimakasih pimpinan Kesimpulan kedua kami tidak sepakat, agar isi perjanjian dirubah dsb. Kami ingin agar kami menolak untuk perjanjian pertahanan dan agar dikembalikan kepada perjanjian latihan bersama. Tks

### **2. Sidarto**

Ekstradisi sudah dittd memang substansinya demikian, lalu kalau dituangkan item-item tadi saya sepakat, itu tidak mungkin dirubah substansinya dalam implementing agreement. Itu sudah didesain, dittd substansinya demikian, mengenai jangka waktu, mengenai kelibatan pihak ketiga, itu tidak mungkin dirubah dalam bentuk IA. IA merupakan suatu aturan pelaksanaan untuk mewadai substansi itu. Jadi kalau mau bicara soal kesimpulan, memang posisi pemerintah dan posisi fraksi-fraksi dalam posisi yang berbeda. Kalau sudah demikian, memang tidak bisa kita beicara bahwa substansi tadi harus diperbaiki dalam implementasi agreement. Saya condong berpendapat bahwa pemerintah sudah menjelaskan secara optimal tentang DCA, dan fraksi-fraksi sebagian besar dalam posisi yang berbeda dengan pemerintah.

### **3. Sabam Sirait**

Membicarakan masalah memperbaiki itu tidak sekarang, tetapi setelah kita nanti membicarakan sekaligus tentang perjanjian ekstradisi. Setelah mendengar itu dari Menlu, baru kita melihat bersama-sama. Jadi kesimpulan tentang materi pokok belum sekarang, kita nanti menunggu sampai kita dapat bahan dari Menlu. Saya kira usul saya ini yang paling moderat saya kira. Terima kasih.

### **4. Efendi Choirie**

Yang lain-lain khususnya tentang kesimpulan kerjasama pertahanan, saya setuju dengan kawan-kawan. Yang kedua soal penyelesaian di Ujung Surabaya, AL kesimpulan seperti ini sama seperti sebelumnya, malah harus lebih konkrit. Konkritnya adalah AL mengajukan anggaran sesuai yang dibutuhkan itu kepada Dephan, kemudian dalam pembahasan APBN-P sekarang ini sudah masuk ke Panitia Anggaran, dibahas antara Komisi I DPR RI dengan Dephan. Itu saya kira lebih konkrit. Supaya ada progresif sehingga komitmen merealisasikan itu semua secara bersama

### **5. Ketua**

Baik saya kira, apa yang disampaikan oleh Saudara Effendi Choirie tadi khususnya masalah Ujung itu saya kira betul itu bahwa kita sekarang minta pada Pemerintah untuk menyampaikan untuk dibahas bersama DPR. Begitu ya? Setuju itu ya Saudara-saudara? Baik, terima kasih

### **6. Panqlima**

Kalau boleh menanggapi kesimpulan terakhir tentang kasus Ujung. Ini kan hanya satu kasus dari sekian banyak kasus yang nanti mungkin timbul. Jadi kalau spesifik seperti itu nanti akan muncul kasus-kasus yang lain. Jadi kalau

diwujudkan dalam kesimpulan yang tidak menunjuk langsung pada satu kasus mungkin lebih baik karena sekarang banyak kasus yang seperti itu muncul nanti. Terima kasih.

#### 6. Afifudin

Saya anggap saja tidak mendengar pendapat dari Panglima. Memang kasus tanah ini di seluruh Indonesia memang banyak. Ditempat saya juga ada, di Antangsanjaya juga ada, di Serang juga demikian. Jadi kalau kita hanya merujuk pada satu kasus ini bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Jadi dalam kesimpulan kalau bisa disebutkan agak umum tetapi kita menekan pada Panglima dan Menhan harus melaksanakan segera kasus-kasus yang ada di Indonesia ini banyak sekali kasus tanah, belum lagi di Serang Banten, waktu kami melakukan Kunker ke Banten, di lapangan terbang ada juga ditempati oleh masyarakat, banyak lagi yang mereka-mereka menuntut. Jadi karena tim kita berangkat ke Surabaya makanya ada kasus Ujung, tapi kalau kita berangkat ke daerah lain di Indonesia pasti ada lagi kita menemukan masalah serupa. Jadi baiknya dalam kesimpulan disebutkan umum, sehingga kita menekankan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih.

#### 6. Effendi Choirie

Kasus banyak, masalah banyak, tetapi ada yang prioritas yang kebetulan inilah yang kita tangani, inilah yang sudah ada kesepakatan, yang lain setelah itu, kan harus jelas begitu. Kalau kita umum lagi itu menjadi gak jelas lagi, gak konkrit lagi kita mau menyelesaikan mana yang sudah kita bahas, kita sepakati di follow up, nanti kalau ada masalah lagi kita bahas lagi, kita follow up. Jadi kesimpulan harus konkrit, jadi tidak umum lagi, harus spesifik, kalau gak kita gak bergerak-gerak, sehingga kemudian kalau kita berfikir seperti itu akhirnya masalah terus muncul baru kita selesaikan, jadi tidak ada yang konkrit, akhirnya semua dari ujung ke ujung menjadi masalah semua dan kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu sekali lagi Ketua kita konkritkan masalah ini karena memang itulah yang sudah kita bahas yang sudah kita ketahui secara detail, kita mendengarkan dari kepalanya sampai kakinya, kita melihat, menyaksikan ya itu, saya kira itu cara mengambil keputusan, kebijakan, dan tindakan. Terima kasih

#### 7. Ketua

Ya, kita bisa pakai, kita tempuh soal ini dengan mencatat berbagai masalah yang terjadi, kemudian sebagai contohnya adalah Ujung. Bisa begitu ya?

#### 8. Mohammad Hatta

Saudara Ketua, ini tertunda ini sebelah sini. Saya ingin menggarisbawahi kesimpulan tadi khususnya berhubungan perlunya memang kita menekankan adanya usaha agar Pemerintah melakukan pembicaraan secara bilateral dengan Pemerintah Singapura. Kembali terhadap point atau butir-butir yang menurut kita ini kan sangat merugikan, karena sangat merugikan itu maka harus ada dorongan dari kita Komisi I terhadap apa kira-kira kekhawatiran kita sehingga perlu Pemerintah melakukan pembicaraan kembali dalam rangka menyempurnakan butir-butir tersebut. Sikap akhir kita kan bisa kita lihat pada waktu ratifikasi, menurut hemat saya perlu karena di dalam jawaban dan pertanyaan yang diajukan oleh Komisi I kita mempertanyakan masalah DCA itu, kalau kita ambangkan maka Raker ini kira-kira ini tentu tidak akan menampung pendapat kawan-kawan kita yang menurut saya cukup sehat dapat diajukan kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan kekhawatiran kita atas nama rakyat yang kita wakili masing-masing.

## 9. Joeslin

Mengenai DCA, jadi memang saya mendukung Pak Hatta dan saya kaitkan dengan statement Menhan ada suatu variabel ekonomi yang sangat kuat sekali tadi. Oleh karena itu saya sudah sebutkan tadi bahwa perlu penambahan anggaran untuk TNI dikaitkan dengan kemampuan mereka menghentikan segala macam illegal. Oleh karena itu perlu ditambahkan point itu dan segera kita mengundang Menkeu apakah bisa memenuhi keinginan TNI kemudian tentunya segala perjanjian bilateral itu akan lebih menguntungkan paling tidak mutual benefit. Oleh karena itu perlu dimasukkan salah satu kesimpulan mengenai anggaran TNI dipertimbangkan untuk dinaikkan. Kedua, masalah kasus Kusmayadi, ini sudah berkali-kali, kelihatannya kok saya bisa mendapatkan kesimpulan memang hasil akhirnya memang tidak akan beda jauh. Ijinkan saya memberi contoh sedikit pada 20 Oktober 1952 ketika Kemal Idris membawa meriam ke istana, waktu itu tidak ada perintah dari KSAD, Kolonel Nasution, tetapi beliau mengambil alih tanggung jawab sehingga konsekuensinya dihentikan dari KSAD, karena ternyata memang tidak ada maksud dari Kemal Idris untuk melakukan pemberontakan kepada Presiden Soekarno. Oleh karena dalam kaitan dengan Kusmayadi, kita telah cek bahwa Kusmayadi ini tidak pernah ada keinginan untuk memberontak atau kudeta atau apapun kepada Pemerintah dan ketika saya juga coba untuk verifikasi dan klarifikasi kepada semua Komandan yang pernah ada di daerah Timor Timur itu reputasinya memang sangat baik sekali. Oleh karena itu dengan referensi yang ada mengapa Panglima TNI tidak pada kesimpulan politik pada sore hari ini bahwa kasus Kusmayadi kita tutup secara politik kita tutup secara hukum dan semua yang terlibat dalam nama-nama ini kita anggap bersih dan murni.

## 10. Ketua

Baik, terima kasih saya kira soal ini tadi kalau masalah ini proses hukum sedang berjalan tentang kasus kusmayadi. Yang kedua, tadi yang dilaporkan yang kita minta untuk menuntaskan/mempercepat penyelesaian proses hukumnya. Yang kedua, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Joeslin sudah tertampung, dan saya kira tadi apa yang diusulkan Pak Hatta, jadi di sini kita kan memang semangatnya tadi kita melihat bahwa perjanjian DCA itu merugikan kita, itu menurut pendapat kita yang di sini, oleh karena itu kita minta supaya diperbaiki dengan memasukkan concern yang ada sorotan kita yaitu soal yang merusak ekosistem, ancaman merusak ekosistem, soal akses kita dalam penggunaan wilayah latihan teknologi, dan alutsista Singapura, soal perincian pembatasan penggunaan wilayah latihan itu dimasukkan dalam pembicaraan kita lagi yang memang sedang berlangsung menurut keterangan Menhan dan panglima TNI dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung tadi tentang implementing arresment dan di dalam pasal-pasal tadi ditunjukkan oleh Pak Tosari juga dalam perjanjian itu di situ memang terbuka untuk memperbaiki dan mengupayakan di situ, ini juga sejalan dengan semangat tadi sebelum itu ada itu memang belum bisa dibawa, memang sebelum implementing arresment itu selesai karena itu memang merupakan bagian yang tidak terpisah dari DCA, itu tidak bisa dibawa ke proses ratifikasi ini, ini yang kita sampaikan. Jadi apakah dengan pemahaman seperti ini saya kira kita sudah Saudara-saudara sekalian

## 11. Joeslin

Sedikit Pimpinan, masalah DCA saya setuju,

## 12. Ketua

Yang masalah DCA ini kita setuju ya?

**13. Rapat**

Ya

**14. Ketua**

Baik

**Ketok Palu 1x**

**15. Joeslin**

Mengenai Kusmayadi dilanjutkan secara hukum silahkan tapi kalau tidak ditemukan pembuktian-pembuktian itu, ya ditutup secara politik.

**16. Ketua**

Baik itu sebagai catatan